



Strategi Politik Identitas dalam Kemenangan Elektoral K.H. Rifa'i, S.H. pada Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024

Nadilla Dewi Ningrum^{1*}, Dori Efendi², Mariatul Qibtiyah³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nadilladewi648@gmail.com

Abstract. *This study analyzes how strategi politik identitas is systematically used by K.H. Rifa'i, S.H. in winning the 2024 Provincial DPRD Election of Jambi in the Bungo–Tebo Electoral District. The main issue of this research stems from the strong influence of identitas keagamaan in the political behavior of Jambi's majority Muslim society, making religious figures occupy a strategic position in electoral contests. This study aims to explain the process of mobilizing identitas keagamaan, utilizing social networks based on pesantren, and constructing a religious image as political capital that contributes to electoral victory. The analysis integrates the concepts of politik identitas and voter behavior as a foundation to understand how collective identity and psychological perceptions of society work in determining political preferences. This study employs a qualitative approach with a case study method, using interviews, observation, and document analysis as the main data collection techniques. The results show that identitas keagamaan, jaringan pesantren, relationships with local religious groups, and the use of religious symbols become determining factors that shape emotional closeness and political trust among the community. This strategy enabled K.H. Rifa'i to obtain the highest votes and outperform the incumbent candidate. The contribution of this research lies in a comprehensive mapping of how politik identitas operates within a local religious political context, and how this strategy can alter electoral configurations and political support patterns at the regional level.*

Keywords: *Electoral; Identity; Local Politics; Political Strategy; Religious Figure*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi politik identitas digunakan secara sistematis oleh K.H. Rifa'i, S.H. dalam memenangkan Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024 di Daerah Pemilihan Bungo–Tebo. Masalah utama penelitian ini berangkat dari kuatnya pengaruh identitas keagamaan dalam perilaku politik masyarakat Jambi yang mayoritas beragama Islam, sehingga tokoh agama memiliki posisi strategis dalam kontestasi elektoral. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses mobilisasi identitas keagamaan, pemanfaatan jaringan sosial berbasis pesantren, dan konstruksi citra religius sebagai modal politik yang berkontribusi pada kemenangan elektoral. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep politik identitas dan perilaku pemilih sebagai landasan untuk memahami bagaimana identitas kolektif dan persepsi psikologis masyarakat bekerja dalam menentukan preferensi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas keagamaan, jaringan pesantren, hubungan dengan kelompok keagamaan lokal, serta penggunaan simbol-simbol religius menjadi faktor penentu yang membentuk kedekatan emosional dan kepercayaan politik masyarakat. Strategi tersebut memungkinkan K.H. Rifa'i memperoleh suara tertinggi dan mengungguli calon petahana. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan secara komprehensif mengenai bagaimana politik identitas bekerja dalam konteks politik lokal yang religius, serta bagaimana strategi tersebut mampu mengubah konfigurasi elektoral dan pola dukungan politik di tingkat daerah.

Kata kunci: Elektoral; Identitas; Politik Lokal; Strategi Politik; Tokoh Agama

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sarana fundamental dalam sistem demokrasi modern untuk menentukan representasi politik melalui mekanisme kompetisi elektoral yang terbuka. Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi proses prosedural untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga arena pertarungan strategi politik yang kompleks, di mana faktor identitas sosial budaya sering kali memainkan peran dominan (Alaydrus, 2019). Sejumlah penelitian tentang perilaku pemilih di Indonesia menunjukkan bahwa orientasi politik masyarakat masih

sangat dipengaruhi oleh figur religius, struktur sosial berbasis komunitas, dan jaringan keagamaan, sehingga identitas agama kerap menjadi variabel penentu dalam pembentukan preferensi politik, terutama di wilayah dengan kultur religius yang kuat.

Fenomena tersebut tercermin jelas di Provinsi Jambi, daerah dengan komposisi penduduk 95,07% Muslim, yang menjadikan isu-isu keagamaan memiliki resonansi kuat dalam kontestasi politik lokal. Tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur sosial yang memiliki modal simbolik untuk mempengaruhi orientasi politik masyarakat. Hal ini membuat strategi politik identitas berbasis religiusitas sering dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih, memperkuat legitimasi sosial, dan memobilisasi dukungan elektoral dalam skala luas (Wati & Wahidin, 2024).

Kajian tentang politik identitas di Indonesia mengonfirmasi bahwa mobilisasi simbol, jaringan pesantren, aktivitas dakwah, dan asosiasi dengan organisasi keagamaan menjadi elemen efektif dalam strategi kampanye calon legislatif maupun kepala daerah. Namun, penelitian mengenai implementasi politik identitas dalam tingkat kompetisi legislatif provinsi, khususnya di Jambi, masih belum banyak dilakukan. Sebagian besar studi lebih menyoroti pengaruh identitas secara umum tanpa menguraikan bagaimana mobilisasi jaringan religius berlangsung secara sistematis, bagaimana citra religius dikonstruksi, serta bagaimana praktik tersebut menghasilkan keunggulan elektoral dalam konteks lokal yang spesifik (Septiadi & Saputra, 2022).

Kekosongan kajian ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kemenangan elektoral K.H. Rifa'i, S.H. pada Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024 di Daerah Pemilihan Bungo–Tebo. Sebagai seorang kyai dan pimpinan pesantren dengan jaringan luas, K.H. Rifa'i berhasil memperoleh 16.124 suara angka yang tidak hanya melampaui calon-calon berpengalaman dengan nomor urut strategis, tetapi juga menggeser petahana dari partai yang sama. Keberhasilan ini tidak dapat dipahami semata melalui faktor popularitas atau kerja partai, tetapi mengindikasikan penggunaan strategi politik identitas yang terstruktur, meliputi mobilisasi jaringan pesantren, penguatan simbol keagamaan, dan konsolidasi komunitas religious (Abdulrahman & Lailiyah, 2025).

Pencapaian tersebut secara akademik penting untuk ditelaah karena memperlihatkan bagaimana identitas keagamaan dapat dioperasionalkan sebagai modal politik dalam konteks pemilu legislatif tingkat provinsi. Di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan diskursus lebih luas mengenai implikasi politik identitas terhadap kualitas demokrasi. Di satu sisi, identitas dapat berperan sebagai instrumen representasi politik kelompok sosial tertentu. Namun di sisi

lain, penggunaan identitas secara berlebihan dan tidak proporsional berpotensi menciptakan polarisasi, mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat, dan menggeser rasionalitas pemilih menuju preferensi simbolik berbasis afiliasi religious (Muhamad et al., 2025).

Dengan demikian, analisis mengenai strategi politik identitas dalam kemenangan elektoral K.H. Rifa'i, S.H. menjadi penting bukan hanya untuk memahami dinamika politik lokal di Jambi, tetapi juga untuk memperkaya kajian tentang bagaimana identitas keagamaan berfungsi sebagai modal politik dalam demokrasi elektoral Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi studi politik lokal, strategi kampanye, dan perilaku pemilih, serta membuka diskusi mengenai tantangan representasi dan kualitas demokrasi dalam era meningkatnya penggunaan politik identitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai strategi politik identitas dalam kontestasi elektoral tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori politik identitas, teori perilaku pemilih, serta temuan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bagaimana identitas sosial khususnya identitas keagamaan berperan sebagai modal politik dalam dinamika pemilu legislatif di Indonesia. Politik identitas pada dasarnya merujuk pada proses pemanfaatan atribut, simbol, dan keanggotaan kelompok tertentu seperti agama, etnisitas, atau komunitas sosial untuk membangun loyalitas politik dan memobilisasi dukungan. Dalam perspektif teori politik modern, identitas dipandang sebagai sumber legitimasi sekaligus instrumen strategi yang dapat dioperasionalkan oleh aktor politik untuk mempengaruhi perilaku pemilih (Jailani et al., 2025).

Miriam Budiardjo dan berbagai pemikir politik kontemporer menekankan bahwa fenomena politik identitas muncul ketika identitas kelompok digunakan tidak hanya sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam konteks Indonesia yang religius, identitas keagamaan memiliki daya tawar yang tinggi karena mampu menembus batas rasionalitas politik dan membentuk ikatan emosional antara kandidat dan pemilih (Samsa, 2021). Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa figur religius, seperti kyai atau pemimpin pesantren, sering kali memiliki posisi strategis dalam kompetisi elektoral. Studi-studi mengenai politik lokal menunjukkan bahwa legitimasi religius dapat dikonversi menjadi legitimasi politik melalui berbagai strategi seperti penggunaan simbol-simbol keagamaan, pemanfaatan jaringan pesantren, kegiatan dakwah sebagai panggung politik, serta penguatan narasi moralitas kandidat (Denny A.K, 2020).

Pemahaman mengenai politik identitas semakin kuat ketika dipadukan dengan teori perilaku pemilih. Pendekatan sosiologis yang diperkenalkan oleh Paul Lazarsfeld menjelaskan

bahwa pilihan politik seseorang dipengaruhi oleh karakteristik sosialnya, termasuk agama dan lingkungan komunitas. Pada wilayah seperti Provinsi Jambi yang mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki kultur religius yang kuat, faktor keagamaan menjadi variabel yang sangat menentukan dalam pembentukan preferensi politik. Sementara itu, pendekatan psikologis dari Campbell menekankan bahwa persepsi terhadap integritas, kesalehan, dan kredibilitas kandidat dapat membentuk identifikasi politik pemilih secara jangka panjang. Dengan demikian, citra kandidat sebagai tokoh agama tidak sekadar menjadi atribut personal, tetapi berfungsi sebagai stimulus psikologis yang memperkuat ikatan emosional dan orientasi pemilih terhadap kandidat tertentu (Sulistyo, 2025).

Kerangka teoritis ini memiliki relevansi langsung dengan konteks keterpilihan K.H. Rifa'i, S.H. dalam Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024. Sebagai seorang kyai dan pimpinan pesantren dengan jaringan sosial keagamaan yang luas, K.H. Rifa'i memiliki modal identitas yang memungkinkan dirinya memasuki arena politik dengan daya dukung kuat. Dalam studi politik identitas, jaringan pesantren dipahami bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai komunitas sosial yang membentuk nilai-nilai, pandangan politik, dan loyalitas kolektif. Jaringan semacam ini sering kali menjadi basis elektoral yang kokoh karena memiliki struktur kepemimpinan yang dihormati, sistem patronase religius, serta ikatan kultural yang mendalam (Banggu, 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan jaringan pesantren serta asosiasi dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari strategi identitas yang terstruktur dan tidak bisa dilepaskan dari keunggulan elektoral K.H. Rifa'i.

Penelitian-penelitian sebelumnya memperkuat argumentasi bahwa politik identitas merupakan strategi efektif dalam pemilu legislatif dan pemilu lokal. Temuan Julita et al. (2024) menunjukkan bahwa identitas keagamaan mampu meningkatkan partisipasi politik terutama di wilayah dengan kultur homogen. Sarofah (2024) menemukan bahwa politik identitas secara signifikan mempengaruhi preferensi pemilih pada pemilu legislatif 2024. Penelitian Ukhra et al. (2021) menegaskan bahwa penggunaan identitas religius dalam kampanye mampu memperluas basis dukungan, meskipun berpotensi menciptakan kompetisi yang eksklusif. Di sisi lain, beberapa penelitian seperti Wingarta (2021) dan Samsa (2021) menggarisbawahi bahwa mobilisasi identitas dapat menjadi alat legitimasi sekaligus sumber potensi polarisasi apabila tidak dikelola secara etis.

Sejumlah penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa politik identitas baik dalam bentuk agama, jaringan pesantren, maupun simbol-simbol moral telah terbukti menjadi strategi politik yang efektif dalam banyak kontestasi politik lokal di Indonesia. Penelitian yang membahas kampanye berbasis jaringan keagamaan, mobilisasi pesantren, dan figur religius

menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya membentuk persepsi positif terhadap kandidat, tetapi juga meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Studi-studi tersebut menjadi pijakan penting untuk memahami bagaimana strategi serupa beroperasi dalam konteks kemenangan K.H. Rifa'i, terutama mengingat luasnya jaringan pesantren Al-Inayah serta kedekatan beliau dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (Julita et al., 2024).

Dengan demikian, teori politik identitas dan teori perilaku pemilih menjadi instrumen analitis yang saling melengkapi. Keduanya memberi kerangka untuk menjelaskan bagaimana identitas keagamaan dimobilisasi secara strategis oleh K.H. Rifa'i dan bagaimana pemilih merespons mobilisasi tersebut dalam konteks sosial-politik yang sangat religius. Integrasi kedua teori ini menjadi dasar penting untuk memahami bukan hanya proses kemenangan elektoral, tetapi juga dinamika sosial yang menyertainya dalam politik lokal Jambi.

3. METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam strategi politik identitas yang berkontribusi terhadap keterpilihan K.H. Rifa'i, S.H. sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 2024. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menelusuri fenomena politik secara holistik melalui eksplorasi makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat dipahami melalui metode kuantitatif. Metode studi kasus memungkinkan analisis fokus pada satu subjek utama K.H. Rifa'i sehingga peneliti dapat menggali keterhubungan antara identitas keagamaan, jaringan sosial pesantren, strategi kampanye, dan respon pemilih pada skala lokal di Dapil Bungo–Tebo (Kurniadi & Hakiki, 2025).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, antara lain K.H. Rifa'i, tim sukses, pengurus Partai Demokrat, tokoh masyarakat, pengamat politik, dan pemilih di wilayah Bungo dan Tebo. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menyesuaikan arah pertanyaan dengan konteks pembicaraan dan memperoleh data yang lebih kaya. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas sosial-keagamaan, interaksi politik, serta dinamika kampanye yang berkaitan dengan penggunaan simbol religius dan jaringan pesantren. Dokumentasi berupa arsip KPU, pemberitaan media, catatan kampanye, dokumen organisasi keagamaan, serta literatur ilmiah digunakan untuk memperkuat data primer.

Seluruh data dianalisis melalui teknik reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif sebagaimana dirumuskan oleh Miles dan Huberman. Proses ini memungkinkan peneliti menemukan pola strategi politik identitas, mengidentifikasi mekanisme mobilisasi

jaringan pesantren, serta memahami bagaimana identitas religius diterjemahkan menjadi dukungan elektoral. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi serta menghindari bias interpretatif.

Rancangan metode ini memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami fenomena keterpilihan K.H. Rifa'i secara komprehensif. Dengan menempatkan strategi politik identitas dalam konteks sosial-politik Provinsi Jambi, penelitian ini tidak hanya menghasilkan gambaran empiris, tetapi juga memungkinkan pembacaan teoritis mengenai peran identitas agama dalam politik lokal Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan utama penelitian mengenai strategi politik identitas dalam kemenangan elektoral K.H. Rifa'i, S.H. pada Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dihimpun selama penelitian lapangan di Kabupaten Bungo dan Tebo. Analisis temuan disandingkan dengan kerangka teoritik mengenai politik identitas dan perilaku pemilih untuk memahami bagaimana identitas religius diolah menjadi modal politik yang efektif dalam kontestasi legislatif tingkat provinsi (Majid et al., 2025).

Konteks Sosial Politik Daerah Pemilihan Bungo–Tebo

Karakter Religius Pemilih

Daerah pemilihan 5 Provinsi Jambi (Bungo–Tebo) secara demografis didominasi pemilih Muslim dengan kultur sosial yang kuat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan pesantren. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa struktur sosial masyarakat cenderung terikat pada jaringan ulama, guru mengaji, dan pemimpin lokal berbasis komunitas masjid. Struktur sosial seperti ini menciptakan ruang politik yang sangat responsif terhadap figur-figur religius.

Tabel 1. Karakter Religius Pemilih di Dapil 5 (Bungo–Tebo)

Aspek Sosial	Temuan Lapangan	Implikasi Elektoral
Komposisi agama	Mayoritas Muslim (>95%)	Tingkat sensitivitas tinggi terhadap simbol religious
Struktur komunitas	Terikat pada pesantren, masjid, guru ngaji	Figur ulama memiliki legitimasi sosial lebih kuat
Pola kepemimpinan	Ulama & tokoh adat memengaruhi preferensi politik	Pemilih mengikuti arahan moral guru agama
Aktivitas keagamaan	Kajian rutin, pengajian, kegiatan majelis taklim	Calon religius lebih mudah diterima.

Kondisi tersebut menghasilkan pola orientasi politik yang tidak hanya mempertimbangkan program rasional, tetapi juga menilai integritas spiritual dan legitimasi moral kandidat. Dalam konteks ini, kehadiran tokoh agama sering dianggap sebagai representasi keamanan identitas kolektif sekaligus simbol kedekatan nilai antara pemimpin dan pemilih (Jegalus, 2024). Pada wilayah seperti Bungo–Tebo, preferensi politik pemilih cenderung terbentuk melalui rekomendasi tokoh agama, jejaring pesantren, dan hubungan sosial berbasis kepercayaan, sehingga figur yang memiliki otoritas keagamaan relatif lebih mudah memperoleh penerimaan publik.

Posisi Tokoh Agama dalam Politik Lokal

Temuan wawancara dari masyarakat dan tokoh adat mengonfirmasi bahwa figur agama memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi dibanding kandidat dari latar belakang non-religius. Hal ini berimplikasi pada tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat yang dinilai memiliki integritas, adab, dan rekam jejak keagamaan yang kuat. Dengan demikian, basis sosial yang religius menjadi titik awal strategis bagi mobilisasi dukungan electoral (Gai et al., 2024).

Implementasi Strategi Politik Identitas oleh K.H. Rifa'i, S.H.

Pemanfaatan Jaringan Pesantren

Salah satu temuan paling signifikan adalah pemanfaatan jaringan Pondok Pesantren Al-Inayah yang dipimpin K.H. Rifa'i. Jaringan ini memiliki ribuan santri dan alumni yang tersebar di Kabupaten Bungo dan Tebo. Hasil observasi menunjukkan bahwa alumni pesantren memiliki peran strategis sebagai simpul mobilisasi suara dalam kontestasi politik. Peran ini diaktualisasikan melalui penguatan ikatan emosional yang mendalam antara santri dan guru, yang kemudian menjadi fondasi loyalitas dalam menentukan pilihan. Selain itu, mobilisasi dilakukan secara terstruktur melalui kampanye berbasis pengajian dan majelis taklim sebagai ruang artikulasi politik yang persuasif. Upaya ini juga diperkuat dengan penggunaan pesan-pesan moral keagamaan guna membangun citra integritas kandidat, sehingga dukungan politik yang muncul selaras dengan nilai-nilai religiusitas yang dianut oleh komunitas tersebut. Keberadaan enam cabang pesantren, lima di antaranya berada di wilayah dapil, memberikan landasan struktural yang secara langsung meningkatkan jangkauan kampanye.

Penggunaan Simbol dan Citra Keagamaan

Citra sebagai seorang kyai dibangun melalui perpaduan beberapa elemen strategis yang saling mendukung. Hal ini dilakukan dengan penggunaan pakaian religius khas ulama untuk memperkuat identitas visual, serta penerapan retorika kampanye yang senantiasa berbasis pada

nilai-nilai akhlak. Selain itu, upaya pencitraan ini juga diperkuat melalui intensitas kegiatan dakwah yang ditingkatkan secara signifikan menjelang pelaksanaan pemilu.

Simbol-simbol tersebut memperkuat persepsi religius kandidat dan berperan sebagai *heuristic cue* bagi pemilih yang tidak terpapar intens kampanye formal. Temuan ini sejalan dengan pendekatan sosiologis dalam teori perilaku pemilih, yang menyebutkan bahwa identitas agama berfungsi sebagai panduan kognitif dalam pengambilan keputusan politik (Herianto & Wijanarko, 2022).

Perbandingan Elektoral dengan Kandidat Lain

Dominasi Suara atas Petahana

Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan bahwa K.H. Rifa'i memperoleh 16.124 suara, jauh melampaui suara petahana Partai Demokrat H. Harmain yang hanya memperoleh 8.101 suara. Perbedaan ini mencerminkan efektivitas strategi berbasis identitas dalam konteks pemilih religius, mengingat secara struktural petahana biasanya memiliki keunggulan jaringan politik dan pengalaman (Munadi, 2024).

Dominasi suara tersebut memperlihatkan bahwa faktor identitas religius dapat menembus batas-batas struktural yang selama ini menguntungkan petahana. Mobilisasi berbasis pesantren, kegiatan-kegiatan keagamaan, serta reputasi K.H. Rifa'i sebagai pemimpin spiritual menciptakan kepercayaan publik yang tidak mudah dicapai oleh kandidat berbasis politik semata. Dalam konteks pemilu legislatif, hal ini mengindikasikan bahwa legitimasi sosial-keagamaan memiliki daya elektoral yang lebih kuat dibandingkan kapital politik formal.

Efek Nomor Urut yang Tereliminasi

Meski berada pada nomor urut 8 posisi yang biasanya kurang strategis K.H. Rifa'i tetap mendominasi perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa efek nomor urut terkompensasi oleh kekuatan identitas religius dan jaringan sosial, konsisten dengan beberapa penelitian yang mengonfirmasi bahwa “modal simbolik” dapat mengungguli modal politik formal.

Pola Perilaku Pemilih dan Respon Masyarakat

Preferensi Berbasis Kesalehan

Wawancara dengan pemilih memperlihatkan bahwa faktor kesalehan dan moralitas dianggap lebih menentukan daripada visi program legislatif. Pemilih cenderung memilih berdasarkan persepsi kejujuran dan keberkahan (*barokah*) yang diasosiasikan dengan pemimpin religius.

Tabel 2. Strategi Politik Identitas KH. Rifa’i S.H. dalam Pemilu DPRD 2024

Elemen Strategi	Bentuk Implementasi	Dampak Elektoral
Jaringan Pesantren	Mobilisasi alumni, wali santri, guru	Basis suara stabil & loyal
Simbol Keagamaan	Narasi kesalehan, pakaian santri/kyai	Citra religius menguat
Hubungan NU & Tokoh Lokal	Kehadiran dalam kegiatan keagamaan	Meningkatkan legitimasi <i>social</i>
Pendekatan Sosiologis	Kunjungan ke masjid & komunitas Islam	Penerimaan cepat & luas

Mayoritas pemilih menilai bahwa pemimpin yang taat beragama dipandang membawa “keberkahan” (*barokah*) dalam menjalankan amanah politik, sehingga keputusan memilih lebih banyak dipandu oleh persepsi religiositas ketimbang pertimbangan rasional mengenai kebijakan. Persepsi ini menegaskan bahwa legitimasi politik di wilayah tersebut dibangun melalui citra kesucian moral, bukan sekadar kompetensi administratif (Hastarini et al., 2025). Dalam konteks tersebut, identitas K.H. Rifa’i sebagai seorang kyai memberi keunggulan simbolik yang sulit disaingi oleh kandidat lain, dan hal ini tercermin dalam tingginya penerimaan publik terhadap dirinya.

Penguatan Solidaritas Komunitas

Dukungan elektoral terhadap K.H. Rifa’i juga terbentuk melalui solidaritas komunitas yang berakar dari hubungan sosial antara guru agama dan masyarakat. Dalam jaringan pesantren, alumni, wali santri, jamaah pengajian, serta pengurus masjid memiliki ikatan sosial yang kuat dan saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan politik. Rasa hormat terhadap guru agama menciptakan mekanisme internal komunitas yang menjaga konsistensi pilihan politik, termasuk dalam menyampaikan preferensi kepada anggota keluarga atau kelompok sosial terdekat. Solidaritas berbasis religius ini berfungsi sebagai modal sosial yang efektif untuk memastikan bahwa dukungan terhadap K.H. Rifa’i tersebar merata dan konsisten di tingkat pemilih akar rumput. Dengan demikian, kemenangan elektoral tidak hanya berasal dari kampanye formal, tetapi juga dari kerja kolektif komunitas religius yang memperkuat kohesi pilihan politik (Fasrah, 2024).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa politik identitas tetap menjadi instrumen strategis dalam politik lokal Indonesia. Konteks religius yang kuat menjadikan identitas bukan hanya penanda simbolik, tetapi juga instrumen mobilisasi efektif yang membentuk preferensi dan konsistensi pemilih (Sadiyin, 2025).

Implikasi Praktis

Penggunaan identitas keagamaan yang intensif menuntut evaluasi terkait etika politik dan kualitas demokrasi. Di satu sisi, strategi ini memperluas representasi kelompok religius; di sisi lain, terdapat potensi eksklusivitas politik yang dapat membatasi ruang persaingan yang setara. Bagi partai politik, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan jaringan sosial berbasis komunitas religius menjadi faktor strategis yang tidak dapat diabaikan dalam pemilu *local* (Sulistyo, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan elektoral K.H. Rifa'i, S.H. pada Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024 merupakan hasil dari penerapan strategi politik identitas yang berjalan efektif dalam konteks sosial masyarakat Bungo–Tebo yang cenderung religius dan berbasis komunitas pesantren. Identitas keagamaan digunakan bukan hanya sebagai simbol representasi moral, tetapi sebagai modal politik yang dimobilisasi melalui jaringan pesantren, otoritas keagamaan, dan kedekatan emosional dengan pemilih. Temuan ini memperlihatkan bahwa orientasi pilihan politik masyarakat di wilayah tersebut lebih banyak ditentukan oleh persepsi kesalehan, kejujuran, serta legitimasi moral pemimpin religius dibandingkan program atau agenda legislatif. Strategi ini juga terbukti mampu mengungguli kelebihan struktural calon petahana yang umumnya memiliki basis jaringan politik lebih mapan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa politik identitas, ketika beroperasi dalam masyarakat dengan kultur religius yang kuat, berpotensi menjadi faktor dominan dalam menentukan hasil pemilu. Di sisi lain, temuan ini juga mengingatkan bahwa ketergantungan pemilih pada simbol kesalehan dapat membatasi perluasan rasionalitas politik dan menggeser fokus dari evaluasi kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu ada upaya memperkuat literasi politik masyarakat agar proses elektoral tidak hanya bergantung pada aspek simbolik, tetapi juga pada penilaian atas kapasitas representasi dan kinerja calon.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup geografis dan karakteristik sosial pemilih yang relatif homogen sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks politik lokal di Indonesia. Studi selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian ke wilayah dengan komposisi sosial lebih heterogen atau membandingkan efektivitas politik identitas antar-daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perannya dalam dinamika demokrasi elektoral Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada para informan penelitian, lembaga penyedia data, serta institusi akademik yang memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan bimbingan ilmiah. Artikel ini merupakan bagian dari pengembangan penelitian yang lebih luas mengenai dinamika politik lokal dan perilaku pemilih. Segala bentuk bantuan yang diberikan telah memperkaya analisis dan memperkuat kualitas kajian dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulrahman, W., & Lailiyah, N. (2025). Networks of faith and politics: Exploring santri electoral behavior in Central Java elections 2024. *Jurnal Politik Walisongo*, 7(2), 115–127. <https://doi.org/10.21580/jpw.v7i2.29102>
- Alaydrus, A. (2019). Strategi Partai Demokrat dalam perekrutan di Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 39–50.
- Banggu, M. (2023). Pola rekrutmen Partai Demokrat dalam menentukan calon anggota legislatif tahun 2019 di Kota Sorong. *ILMU-ILMU SOSIAL*, 8(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2405>
- Denny, A. K., & F. E. (2020). Strategi kampanye politik pemilihan kepala desa dalam upaya menggiring opini publik (Studi pada Pilkades Serentak Kabupaten Blitar 2019). *Translitera*, 9(2), 12–23. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.965>
- Gai, A., Alfirdaus, L. K., & Herawati, N. R. (2024). Pragmatism over piety: Understanding Muslim electoral choices in East Nusa Tenggara's local elections. *MUBARRIK*, 7(2), 395–406.
- Hastarini, R. A., Risma, P., Dwi, E., Prastiwi, Y., Nurul, A., Rahmat, P., & Abghia, N. (2025). Branding Islam dalam kampanye politik 2024: Dampaknya terhadap preferensi memilih mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Pendidikan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3962>
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Indah, F., & Fasrah, D. D. (2024). Strategi partai Islam dalam memenangkan pemilu: Pendekatan konseptual terhadap dinamika politik di era disrupsi. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 3(1), 16–26.
- Jailani, A., Astuti, V. S., Ulva, N., & Devi, K. (2025). Pengaruh identitas agama terhadap keberpihakan pemilih pada kandidat bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(3). <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss3.1743>
- Jegalus, N. (2024). Identity politics and religious recognition in Indonesian democracy: A post-secular perspective. *MUBARRIK*, 7(2), 419–431.

- Julita, E., Gultom, L. H., Carnova, Y. T., & Ivanna, J. (2024). Politik identitas pada pemilihan kepala desa: Studi kasus Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 12066–12075.
- Kurniadi, E., & Hakiki, K. M. (2025). Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan politik identitas perspektif Al-Quran (Studi penafsiran Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zilal Quran). *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 7, 131–144. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i1.1555>
- Majid, N. K., Pucangan, D., Kartasura, K., & Sukoharjo, K. (2025). Dinamika politik identitas di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3).
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Aulia, R., Nur, A. A., Muqsitin, F. L., Pandawa, A. J., Iv, D., Kartasura, K., & Sukoharjo, K. (2025). Komunikasi politik Islam di era digital: Kajian terhadap strategi partai Islam dalam pemilu UIN Raden Mas Said Indonesia media konvensional secara signifikan. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(April). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.610>
- Munadi, M. (2024). The relevance of Muslim identity voters in elections in Banjarnegara Regency. *UNNES Political Science Journal*, 8(2), 109–112. <https://doi.org/10.15294/upsj.v8i2.13285>
- Sadiyin, M. (2025). Populisme partai politik Islam dalam konteks pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan. *Journal of Sharia*, 04(01), 1–16. <https://doi.org/10.55352/josh.v4i01.2027>
- Samsa, A. (2021). Strategi politik identitas perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2019 (Studi tentang kemenangan Ade Kartika di daerah pemilihan II Kabupaten Majalengka). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 09(1), 93–108. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i1.2009>
- Septiadi, M. A., & Saputra, A. (2022). Sistem pemilihan di Indonesia: Perspektif Islam terhadapnya. *Indonesian Journal of Political Studies*, 2(1), 41–58. <https://doi.org/10.15642/ijps.2022.2.1.41-58>
- Sulistyo, H. (2025). Between theocracy and pluralism: Identity politics and local leadership in Indonesia. *Dakwah dan Sosial*, 8(1), 91–104. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v8i1.7129>
- Wati, I., & Wahidin, D. (2024). Strategi politik Kiai pada konstelasi pemilihan umum tahun 2024. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 6, 144–153.